

BAB II

IDHAM CHALID: RIWAYAT HIDUP DAN GAYA KEPEMIMPINANNYA

A. Kelahiran Idham Chalid

Idham Chalid lahir pada tanggal 27 Agustus 1922 di Setui, dekat Kecamatan Kotabaru, bagian tenggara Kalimantan Selatan, dan merupakan anak sulung dari lima bersaudara. Ayahnya H Muhammad Chalid, penghulu asal Amuntai, Hulu Sungai Tengah, sekitar 200 kilometer dari Banjarmasin. Saat usia Idham enam tahun, keluarganya hijrah ke Amuntai dan tinggal di daerah Tangga Ulin, kampung halaman leluhur ayahnya.¹

Ahmad Muhajir menyatakan bahwa menurut cerita, kepindahan tersebut didahului oleh suatu kejadian di mana Idham dan orang tuanya diserang oleh sekelompok orang. Walaupun mereka selamat, tak pelak kejadian tersebut

¹ Lihat Rusman Effendi dalam *Kiai Idham Chalid, Pemimpin Besar dari Amuntai*, <http://dunia-fortal.blogspot.com/2012/09/kiai-idham-chalid-pemimpin-besar-dari.html>, diakses tanggal 4 April 2013. Lihat juga Ahmad Muhajir, *Idham Chalid: Guru Politik Orang NU*. Cet. Ke-1. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), h. 13. Dari sedikit publikasi yang ada tentang Idham antara lain dalam Tim Penulis Tempo, *Apa dan Siapa Sejumlah Orang Indonesia 1981-1982* (Jakarta: Grafiti, 1981), h. 99; Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS, 1994), h. 290-291; serta semacam *Curriculum Vitae* yang ditanda tangani Idham yang dilampirkan dalam kumpulan pidatonya, *Mendajung dalam Taufan*. (Djakarta: Endang-API Islam, 1966), h. 133-135. Selebihnya kisah Idham Chalid disajikan secara sepenggal-sepenggal di berbagai tulisan baik ilmiah maupun berita di media massa dan biasanya berkaitan dengan sejarah NU. Idham Chalid, *Mendajung...*, h. 133. Berbeda dengan yang dimuat Tempo, Idham disebutkan lahir 5 Januari 1921. Lih. Tim Penulis Tempo, *Apa dan Siapa*, h. 99. Data-data inilah yang dikutip Martin van Bruinessen, dan Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama, Sejarah NU 1952-1967*, terj: Farid Wajidi dan Mulni Adelina Bachtar. (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 67.

menimbulkan perasaan tidak aman dan tidak nyaman orang tua Idham sehingga memutuskan untuk meninggalkan daerah tersebut.²

Idham menghabiskan masa kecilnya di Amuntai. Karena kecerdasannya, Idham langsung ditempatkan di kelas II ketika mendaftar masuk Sekolah Rakyat (SR) Amuntai. Kemampuannya berpidato pun sudah terasah sejak kecil, dan terus berkembang sampai besar, dari pidato biasa, sampai menjadi juru kampanye. Tak tanggung-tanggung, da'i kondang selevel Zainuddin MZ dan Syukron Makmun pun pernah berguru padanya. Kemampuannya ini pula yang dikombinasikan dengan kecerdasan dan kerendahan hati, yang menjadi modal bagi perjalanannya di dunia politik. Ia menamatkan pendidikan dasarnya pada tahun 1935.³

Idham kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah al-Rasyidiyyah (dulunya bernama Arabisch School). Bertambahnya jumlah santri menyebabkan tempat pengajian dipindah ke ruang surau (mushalla). Akan tetapi, yang cukup menarik dan terbilang maju saat itu adalah penggunaan perlengkapan belajar seperti meja, kursi dan papan tulis. Meningkatnya animo masyarakat membuat sang guru membangun gedung dan dinamainya Arabische School (Sekolah Arab). Sekolah ini didirikan oleh Tuan Guru H. Abdurrasyid pada tahun 1922. Dia merupakan lulusan universitas Al-Azhar yang saat itu terkenal sebagai pusat studi agama Islam. Lembaga ini awalnya hanya pengajian yang dilangsungkan di rumah

² Lihat Ahmad Muhajir, *Idham Chalid...*, h. 20.

³ *Ibid.*, h. 21.

dengan sistem halaqah (para santri duduk di sekeliling guru sambil mengikuti pelajaran).⁴

Sebagai tipikal ulama pelopor pendirian perguruan agama, dia tidak hanya mendirikan sekolah di Amuntai, tetapi juga di berbagai wilayah di Hulu Sungai. Murid-murid dia yang terkemuka juga diberi tugas membuka sekolah-sekolah agama jika telah kembali ke daerah mereka. Ia yang lulusan Al-Azhar merekrut ulama-ulama setempat yang sebagiannya lulusan Makkah dan memberikan keleluasaan bagi pengembangan sekolah. Bila telah ada generasi muda yang dinilai siap untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan, dia akan menyerahkannya dan pergi ke daerah lain untuk mendirikan perguruan agama yang lain.⁵

Sekolah ini diganti namanya menjadi Madrastur Rasyidiyah, dengan pengertian bahwa perguruan Islam ini adalah warisan sekaligus cita-cita Tuan Guru Abdurrasyid yang harus terus diperjuangkan. Kepemimpinan sekolah ini diserahkan oleh Tuan Guru H. Abdurrasyid kepada H. Juhri Sulaiman pada 22 Agustus 1931, karena dia akan pergi ke Kandangan (HSS) untuk mendirikan perguruan Islam di sana.⁶

Sekolah ini merupakan alternatif bagi sekolah yang didirikan Belanda. Selain faktor kepribumiannya, sekolah ini mendapat respons yang positif karena

⁴*Ibid.*, h. 22.

⁵ *Ibid.*,

⁶ Panitia Pelaksana, *50 Tahun Perguruan Islam Rasyidiyyah Khalidiyyah (Rakha) Amuntai-Kalimantan Selatan 1922-1972* (Amuntai: Yayasan Pemelihara Perguruan Islam Rakha, 1972), h..23-32 sebagaimana dikutip oleh Ahmad Mudasir dalam *Idham Chalid*,...h. 23.

latar keagamaan masyarakat Amuntai yang mempengaruhi pilihan pendidikan bagi putra-putri mereka.⁷

Ahmad Mudasir menyatakan dari hasil wawancaranya dengan H. Taberani Basri dan Istri, bahwa kesinambungan dan perubahan menjadi ciri khas sekolah ini. Beberapa kali terjadi perubahan sistem pendidikan seiring dengan bergantinya pucuk pimpinan. Direkrutnya para pengajar dari Pondok Modern Gontor adalah salah satu perkembangan yang terjadi saat Idham bersekolah di sana. Tokoh dari Gontor yang berpengaruh bagi sekolah ini di masa-masa awal pengembangannya adalah ustadz Arif Lubis. Pengajar dari Gontor inilah yang kemudian memberikan warna “modern” bagi sekolah ini. Pengetahuan umum dimasukkan, organisasi didirikan, bahasa Arab dan Inggris dipraktikkan. Hal ini memberi pengaruh yang positif bagi Idham. Bahasa yang dikenalnya pun bertambah, yakni bahasa Arab dan Inggris, dan merupakan pengalaman pertamanya pada organisasi. Para pengajarnya pula yang membuat Gontor menjadi pusat tujuan para murid setamatnya dari sekolah tersebut.⁸

Adapun dari wawancaranya dengan H. Napiah, Ahmad Muhajir menyebutkan dalam bukunya bahwa semenjak tamat tahun 1938, Idham semakin sering diundang untuk berceramah di berbagai acara dan pertemuan. Hal ini membuat namanya dikenal luas dan pergaulannya tidak terbatas pada teman-temannya saja, melainkan pemuka-pemuka agama yang sudah terkenal di daerah itu. Akan tetapi, pihak keluarganya menginginkan dirinya melanjutkan

⁷ *Ibid.*, h. 23.

⁸ *Ibid.*, h. 23.

pendidikannya. Idham adalah anak yang cerdas dan berbakat sehingga sayang kalau pendidikannya tidak dilanjutkan. Kira-kira demikianlah kesimpulan keluarganya dalam mengamati perkembangan beliau.⁹

Tahun 1938, Idham dikirim bersama beberapa orang temannya melanjutkan pendidikannya ke Pondok Modern (PM) Gontor Ponorogo dalam “misi studi” almahatarnya. Selama 5 tahun menimba ilmu di sana, Idham menyelesaikan pendidikannya. Tiga tahun Idham di Kulliyah al-Mu’allimin (pendidikan guru agama Islam) dan sisanya di tingkat Kweeksschool Islam Bovenbouw.¹⁰ Hal ini kembali menunjukkan kecerdasannya karena lazimnya hingga tingkat tersebut seorang santri harus menghabiskan waktu 7 hingga 8 tahun. Tahun 1943, Idham meneruskan pendidikannya ke Jakarta, dan setahun kemudian menjadi guru di Gontor, sekaligus menjabat wakil direktur di sana.

Di Gontor kesadaran berorganisasi Idham semakin meningkat, dan menemukan salurannya dalam gerakan kepanduan. Kelak, ketika Idham menjadi kepala pesantren di Amuntai, gerakan kepanduan menjadi organisasi penting dalam menumbuhkan kesadaran kebangsaan bagi murid-muridnya. Gerakan kepanduan yang dikembangkannya juga mengandung nuansa keislaman yang sangat kental sehingga melengkapi kesadaran kebangsaan yang ingin ditularkannya.

Dalam hal kemampuan berbahasa, selain penguasaan bahasa Arab dan Inggris yang semakin meningkat, di Gontor ia mendapatkan kemampuan

⁹ *Ibid.*, h. 24.

¹⁰ Idham Chalid, *Mendajung dalam Taufan*. (Jakarta: Endang-Api Islam, 1966), h. 133.

berbahasa Jepang. Ia bahkan menjadi pengajar bahasa ini. Pihak Jepang yang sangat senang dengan adanya anak muda pribumi yang menguasai “bahasa ibu” mereka, bahkan sempat mengundangnya untuk berkunjung ke negeri Matahari Terbit tersebut.¹¹ Saifuddin Zuhri, seorang tokoh dari NU yang satu angkatan dengan Idham, mengingat Idham Chalid sebagai penerjemah pihak Jepang (*Soomubucho*) bila mereka berbicara di depan para alim ulama atau tokoh tokoh Islam lainnya.

H. Napiah, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Muhajir dari hasil wawancaranya:

“Ia memang terampil sekali menyalin pidato pembesar Jepang itu ke dalam bahasa Indonesia, sampai-sampai Jepang mengira pidatonya belum disalin semuanya. Ia berbicara dalam bahasa Jepang dengan cepat dan seperti aksen Jepang juga, manakala harus berdialog dengan pembesar Jepang itu,” kenangnya.

Tim Penulis Tempo, - sebagaimana dikutip oleh Ahmad Muhajir – menyatakan bahwa selain itu, sebagaimana lazimnya tokoh yang lahir di masa-masa pemerintahan kolonial, Idham juga fasih berbahasa Belanda. Ditambah dengan bahasa Prancis dan Jerman yang dikuasainya secara pasif, Idham Chalid menguasai 6 bahasa internasional.¹²

¹¹ Saifuddin Zuhri, *Guruku Orang-Orang dari Pesantren*. (Yogyakarta: LKiS, 2001), h.373-374.

¹² Ahmad Muhajir, *Idham Chalid....*, h. 27.

B. Pendidikan dan Kontribusi Idham Chalid dalam Dunia Pendidikan

Idham Chalid diundang ke Jepang, dan kabar tersebut sampai ke kampung halamannya. Orang tuanya bukannya senang, mereka justru mengkhawatirkannya. Hal ini wajar karena Jepang datang ke Indonesia bukan sebagai tamu atau penolong, melainkan penjajah yang menggantikan Belanda. Ditambah kerinduan setelah lima tahun berpisah, orang tua Idham memanggilnya pulang. Pada tahun 1945, Idham kembali ke Kalimantan Selatan. Tidak berselang lama ia diminta menjadi Kepala di sekolahnya dulu, Madrasatur Rasyidiyyah. Sekolah tersebut mengalami kekosongan pimpinan dalam rentang waktu hampir satu tahun, sejak 1944, terkait dengan semakin ketatnya pengawasan dari pihak Jepang.¹³

Berbekal pengetahuan dan pengalaman di tanah rantau Idham Chalid kembali dengan membawa semangat perubahan ke dalam almamaternya. Idham Chalid merubah nama sekolah tersebut diubah menjadi Normal Islam Amuntai. Normal berasal dari bahasa Belanda (Noormaal) yang berarti sekolah lanjutan. Nama ini nampaknya merujuk pada sekolah “Normal Islam” Padang (Sumatera Utara) yang merupakan almamater sebagian besar guru yang mengajar Idham ketika di Gontor. Perubahan nama ini seiring dengan perubahan sistem pengajaran dan pendidikan yang disesuaikan dengan yang diikuti Idham di PM Gontor.

Sistem pengajaran ini sudah mendapat pondasi karena pimpinan sekolah sebelum Idham telah mengenalkannya. Kepala sekolah tersebut adalah H. M. Arif

¹³ Ahmad Muhajir, *Idham Chalid...*, h. 27.

Lubis yang merupakan lulusan Normal Islam Padang dan pernah mengajar di Gontor.

Perubahan terutama pada penambahan mata pelajaran ilmu-ilmu eksakta dan pengetahuan umum, di samping ilmu-ilmu agama beserta penunjangnya (Ilmu Alat). Perbandingannya adalah 60% pelajaran agama, dan 40% pelajaran umum. Dalam kesehariannya bahasa Arab digunakan sebagai bahasa pengantar.

Semangat lain yang dibawa Idham adalah semangat kebangsaan. Sebagai anak zaman yang terlahir dan tumbuh di zaman revolusi kemerdekaan, Idham Chalid mendapatkan kesadaran tentang Indonesia Merdeka. Kemungkinan besar kesadaran ini telah didapat sewaktu masih di Amuntai dan diperkuat saat bersekolah di Gontor. Kesadaran yang sama “ditularkan” dan ditanamkan kepada murid-muridnya di Normal Islam Amuntai pada saat proses belajar mengajar di kelas.

Nampaknya jiwa dan roh dari kurikulum ini adalah tekanannya kepada penguasaan bahasa Arab dan Inggris, sebagai bahasa agama, ibadah dan ilmu pengetahuan serta komunikasi internasional. Karena itu bukan saja mata pelajaran agama diajarkan dengan mempergunakan kitab-kitab berbahasa Arab, bahkan pelajaran umum pun juga diajarkan dengan referensi kitab-kitab berbahasa padang pasir tersebut. Mata pelajaran umum yang diajarkan dengan mempergunakan

buku-buku berbahasa Arab seperti pelajaran *At Tarbiyah wa at-Ta'lim, al Adyan, Ilm an Nafas, Falsafah, Thabaqah al Umam* dan sebagainya.¹⁴

Ahmad Muhajir menyebutkan bahwa Idham Chalid yang terlahir dan tumbuh pada di zaman revolusi kemerdekaan mendapatkan kesadaran tentang Indonesia merdeka. Kemungkinan besar kesadaran ini telah didapat sewaktu masih di Amuntai dan diperkuat saat bersekolah di Gontor. Kesadaran yang sama “ditularkan” dan ditanamkan kepada murid-muridnya di Normal Islam Amuntai pada saat proses belajar-mengajar di kelas.¹⁵ Ini adalah bagian kedua dari semangat perubahan yang dibawakannya.

Idham bersama teman-temannya mendirikan *Ittihad al Ma'ahid al Islamiyyah* (IMI) atau Ikatan Sekolah-sekolah Islam, hal ini menunjukkan kecenderungan aktifisnya dan kemampuannya mengorganisir massa terlihat ketika. Sebagaimana telah disebutkan, ada kecenderungan untuk mendirikan perguruan-perguruan agama dalam masyarakat di Amuntai. Pada saat kekuasaan Jepang di Hindia Belanda hampir lumpuh, kondisi perguruan-perguruan Islam di daerah ini sangat menyedihkan sebagai akibat ketatnya sistem yang dijalankan oleh Jepang. Tidak sedikit sekolah yang tutup karena dicurigai pemerintah Jepang. Idham melihat adalah saat yang tepat bagi perguruan-perguruan yang masih tersisa untuk bangkit kembali. Terdorong oleh komitmen terhadap pendidikan

¹⁴ A. Rafi'ie, *Kurikulum Pendidikan dan Pengajaran Pesantren Rasyidiyyah Khalidiyyah Amuntai*, makalah disampaikan dalam Rapat Paripurna Reuni Alumni Rakha tahun 2001 sebagaimana dikutip oleh Ahmad Muhajir, *Idham Chalid,*, h. 28.

¹⁵ Panitia Pelaksana, *50 Tahun....*, h.34. Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Muhajir, *Idham Chalid....*, h. 29.

Islam Idham Chalid dan beberapa temannya mendirikan IMI dengan tujuan mempersatukan dan membangun kerja sama di antara perguruan-perguruan Islam. Ada tujuh perguruan yang saat itu bergabung dalam IMI, yaitu *Normal Islam-Pekapuran*, Amuntai; *Al Fatah*- Paliwara Hilir; *Zakhratun Nisaa*- Paliwara Hulu; *Al Hidayah*- Sungai Durian; *At Tadhhiyyah*- Pekapuran; *Al Fajar*- Paringin; *As Sullamun Najah*- Telaga Selaba; dan *Asy Syafi'iyah*- Lok Bangkai. Mereka menyadari hanya dengan bekerja sama maka umat Islam dapat maju ke depan dan terus menyebarkan ajaran Islam dan pengetahuan umum. Idham Chalid pun diangkat menjadi Ketua Umumnya dan Normal Islam sebagai pusat segala kegiatan.¹⁶

Dari wawancara Ahmad Muhajir dengan H. Taberani Basri dan Istri, beliau menyimpulkan bahwa jaringan IMI terus bertambah luas dan nama Normal Islam Amuntai pun semakin melambung tinggi. Kepopuleran Normal Islam Amuntai dan kemajuan sistem pengajarannya membuat sekolah-sekolah lain di daerah ini meniru atau bekerja sama untuk mengembangkan diri. Bahkan, para pengajar di sekolah lain selalu menginginkan kesempatan mengajar di sekolah ini. Hal ini semakin memopulerkan nama Idham. Akan tetapi, seorang Idham ternyata tidaklah puas dengan hanya menjadi seorang kepala sekolah saja. Adalah benar bahwa ia telah kembali ke almamaternya, membangun jaringan, dan menjadikannya dikenal luas. Akan tetapi, ia merasa perjuangannya memiliki lingkup yang melebihi batas-batas sekolahnya, yaitu perjuangan demi bangsa dan

¹⁶ Idham Chalid, *Mendajung...*, h.133. Kepengurusan IMI terdiri dari dua Majelis, Majelis Syura dan Majelis Luhur. Idham menjadi Ketua Majelis Luhur. Susunan lengkap majelis luhur lih. Panitia Pelaksana, *50 Tahun...*, h.114.

tanah air. Maka, tugas-tugas keseharian sebagai kepala sekolah diserahkan kepada “tangan kanannya”, H. Napiyah, dan memungkinkannya memiliki waktu yang lebih banyak untuk terlibat dalam berbagai aktivitas di luar sekolah.¹⁷

C. Karir Politik Idham Chalid

Idham Chalid adalah seorang ulama dan politikus pelaku filosofi air. Dia seorang tokoh Indonesia yang pernah menjadi pucuk pimpinan di lembaga eksekutif, legislatif dan ormas (Wakil Perdana Menteri, Ketua DPR/MPR, dan Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama). Juga pernah memimpin pada tiga parpol berbeda yaitu Masyumi, NU dan PPP.

Laksana air, peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Al-Azhar University, Kairo, ini seorang tokoh nasional, yang mampu berperan ganda dalam satu situasi, yakni sebagai ulama dan politisi. Sebagai ulama, ia bersikap fleksibel dan akomodatif dengan tetap berpegang pada tradisi dan prinsip Islam yang diembannya. Demikian pula sebagai politisi, ia mampu melakukan gerakan strategis, kompromistis, bahkan pragmatis.

Dengan sikap dan peran ganda demikian, termasuk kemampuan mengubah warna kulit politik dan kemampuan beradaptasi terhadap penguasa politik ketika itu, ulama dari Madrasah Pondok Modern Gontor, ini tidak khawatir mendapat kritikan dan stereotip negatif sebagai tokoh yang tidak mempunyai pendirian, bunglon bahkan avonturir.

¹⁷ *Ibid.*, h. 30-31.

Peran ganda dan kemampuan beradaptasi dan mengakomodir itu kadang kala membuat banyak orang salah memahami dan mendepksripsi diri, pemikiran serta sikap-sikap sosio-politiknnya. Namun jika disimak dengan seksama, sesungguhnya KH Idham Chalid yang berlatarbelakang guru itu adalah seorang tokoh nasional (bangsa) yang visi perjuangannya dalam berbagai peran selalu berorientasi pada kebaikan serta manfaat bagi umat dan bangsa. Dengan visi perjuangan seperti itu, pemimpin NU selama 28 tahun (1955-1984), itu berpandangan tak harus kaku dalam bersikap, sehingga umat selalu terjaga kesejahteraan fisik dan spiritualnya. Apalagi situasi politik di masa demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila, tidak jarang adanya tekanan keras dari pihak penguasa serta partai politik dan Ormas radikal.¹⁸

Catatan yang dibuatnya menunjukkan keterlibatannya sebagai Sekretaris Panitia Kemerdekaan Indonesia Daerah (HSU) di kota Amuntai tahun 1945. Pada saat itu, Idham adalah ketua partai Masyumi Amuntai. Aktivasnya di Masyumilah yang pada akhirnya membawa Idham ke pentas politik nasional.

Kemerdekaan yang diproklamirkan Soekarno-Hatta di Jakarta tahun 1945, tidak serta merta membuat negeri ini terlepas dari masalah. Usai Jepang meninggalkan Indonesia karena kalah perang dari pihak Sekutu di Pasifik, datanglah NICA (Netherland Indies Civil Administration) yang membonceng tentara Sekutu. Kalimantan pun tidak luput dari arus besar kedatangan kembali pasukan NICA yang saat itu berada di bawah pimpinan Mayor A. L. Assenderp.

¹⁸ Lihat Anonim, *KH Idham Chalid, Ulama Aswaja dan Pejuang NKRI*, <http://generasisalaf.wordpress.com>, diakses tanggal 4 April 2013.

Sebagai tentara sekutu yang menang perang, NICA berusaha menyusun kembali pemerintahan sipil dengan cara menghubungi bekas pegawai Binnenlands Bestuur untuk kembali bekerja bersama mereka. Tindakan ini menimbulkan beberapa pilihan dan ketegori bagi pemimpin-pemimpin rakyat di Kalimantan bagian Selatan:

1. Menolak kedatangan NICA dan meninggalkan daerah, kemudian pergi ke Pulau Jawa. Mereka adalah kaum cerdas pandai atau intelektual yang berpandangan bahwa kekuatan untuk melawan Belanda belumlah cukup, sehingga menyingkir untuk sementara adalah pilihan yang realistis bagi mereka.
2. Menerima kedatangan NICA dan bersedia bekerja sama sebagai pegawai NICA. Kebanyakan dari mereka adalah bekas pegawai Belanda yang tidak mau berkonflik dan mereka pernah menikmati keuntungan-keuntungan saat bertuanan bule dri tanah rendah itu.
3. Mereka yang menentang kembalinya NICA berkuasa dan berjuang secara politik. Terdiri dari tokoh-tokoh politik yang dengan intens mengikuti perkembangan dan berjuang secara legal parlementer dengan cara menyalurkan aspirasi politiknya lewat partai-partai politik, seperti Persatuan Rakyat Indonesia (PRI), Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI), Serikat Muslimin Indonesia (Sermi). Corak pergerakan organisasi-organisasi ini memang lebih menampakkan sisi perjuangan politik legal di luarnya, namun hubungan dengan organisasi pemberontak atau badan-badan perjuangan yang menggunakan senjata tetap dijalin, bahkan ada yang sengaja membikin kesatuan besenjata underbouwnya. Tidak jarang, sebagian aktivisnya merangkap keanggotaannya; menjadi politisi sekaligus orang gerilya.
4. Kelompok yang menentang dengan tegas kembalinya NICA berkuasa dan memilih berjuang mengangkat senjata untuk mengusir mereka. Kelompok ini dimotori para ulama dan rakyat biasa. Mereka bergerilya keluar-masuk hutan, bersembunyi di gunung-gunung sambil menyusun kekuatan untuk mengusir NICA. “Banteng Indonesia” pimpinan Hassan Basry di Kandangan, “Badan Pemberontakan Rakyat Kalimantan” (BPRK) di Banjarmasin, “Barisan Pelopor Pemberontak Kalimantan Indonesia” (BPPKI) pimpinan Gusti Saleh di Martapura, “Gerakan Rakyat Pengejar dan Pembela Indonesia Merdeka” (Gerpindom), di Amuntai, dan “Gerakan Pemuda Indonesia Merdeka”, dengan singkatan

yang sama (Gerpindom) di Birayang adalah contoh dari kelompok keempat ini.¹⁹

Partai politik pertama yang didirikan di Kalimantan atas anjuran pemerintah Jepang adalah Persatuan Rakyat Indonesia (PRI) yang bertempat di Banjarmasin yang berdiri secara resmi pada 16 Agustus 1945, dengan diketuai oleh Pangeran Muda Ardi Kesuma. Idham Chalid pun bergabung menjadi anggota dari PRI tersebut.²⁰

Pada tanggal 15 Agustus 1945 tuan Hayakawa, Borneo Minseibu Cokan, memanggil tokoh-tokoh pergerakan di Banjarmasin, yaitu Hadariyyah M, Mr. Rusbandi dan Pangeran Muda Ardi Kesuma. Dijelaskan pada mereka bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu dan dalam waktu dekat tentara sekutu akan tiba di Banjarmasin. Pemerintah Jepang juga menyarankan agar di Banjarmasin didirikan sebuah partai politik. Tuan Hayakawa semula mengharapkan agar PRI bisa membela kepentingan Jepang, sehingga segenap fasilitasnya digunakan untuk mengembangkan partai ini. Tetapi, orang-orang Jepang itu harus gigit jari karena keberpihakan pengurus PRI justru kepada kemerdekaan RI.

Setahun kemudian, Idham bergabung di Serikat Muslimin Indonesia (Sermi), dan duduk sebagai Anggota Pengurus Besar dan Komisaris Daerah Hulu Sungai Utara dan Selatan. Sermi juga merupakan organisasi politik dari kalangan masyarakat muslim setempat dengan tujuan mempertahankan kemerdekaan

¹⁹ Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah (Bappelda) Pem. Prov. Kal-Sel, *Sejarah Banjar...*, h. 345. Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Muhajir, *Idham Chalid.....*, h. 33.

²⁰ *Ibid.*, h. 34. Lih. Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah (Bappelda) Pem. Prov. Kal-Sel, *Sejarah Banjar...*, h. 343 dan Yusni Antemas dkk, *Lintas Sejarah Perjuangan Kemerdekaan dan Berdirinya Kabupaten HSU*. (Amuntai: Pemkab. HSU, 2003), h. 28.

Republik Indonesia sesuai cita-cita proklamasi. Penduduk Kalimantan bagian Selatan mayoritas beragama Islam sehingga Sermi mendapat sambutan yang luas. Didirikan di Banjarmasin tahun 1946, dengan pimpinan seorang ulama bernama H. Abdurrahman Siddik. Kemudian organisasi pergerakan Sermi secara diam-diam membentuk Lasykar Saifullah yang tugasnya menyambut kiriman senjata dari Pulau Jawa. Senjata-senjata tersebut kemudian digunakan untuk melawan Belanda.²¹

Pada tahun 1947, Idham bergabung dengan Sentral Organisasi Pemberontak Indonesia Kalimantan (SOPIK), sebuah organisasi bawah tanah yang melakukan perang gerilya melawan Belanda. Pemimpinnya adalah seseorang yang pernah berguru padanya, yakni Brigjen Hassan Basry. Hassan Basry sebelumnya adalah pimpinan Lasykar Saifullah. Dia mulai bergerilya sejak akhir September 1946, ketika banyak pimpinan Lasykar tersebut ditangkap Belanda. Akan tetapi, ia berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di hutan sambil menyusun kekuatan. Baik Hassan Basry maupun Idham pernah “nyantri” di Pondok Modern Gontor-Ponorogo, dan besar kemungkinan bertemu di sana sebagai guru dan murid.²²

Organisasi ini kemudian dilebur menjadi ALRI DIVISI IV.²³ Di sini, Idham menjadi Penasihat Staf Umum. Keterlibatannya di SOPIK menyebabkan

²¹ *Ibid.*, h. 35.

²² *Ibid.*,

²³ Ahmad Muhajir menjabarkan bahwa ALRI atau Angkatan Laut Republik Indonesia DIVISI IV berdiri di Mojokerto (Jawa Timur). Organisasi ini bertugas mempersatukan kekuatan

dia ditangkap dan ditahan tentara NICA pada 27 Maret 1949, dengan tuduhan menjadi penasihat, pelatih, dan mendalangi gerilya. Tuduhan tersebut didasarkan pada fakta bahwa pimpinan gerilya adalah Hassan Basry yang pernah jadi muridnya ditambah sebuah fakta lain, yaitu ditemukannya selebar photo oleh tentara NICA ketika menggerebek sebuah studio photo Banjarmasin. Photo tersebut memuat Idham Chalid bersama J. Hamdi dan Chairul Lima dengan seragam masing-masing sebagai pelatih, ketua, dan penulis Kwartir Cabang Kepanduan Rakyat Indonesia (KRI) di Amuntai. Sekaligus ketiga orang itu juga dituduh sebagai *onderbouww* gerakan bawah tanah Gerpindom. Di tahun 1948, Idham bersama Hassan Basry dan anggota ALRI DIVISI IV mendirikan Founds Nasional Indonesia Kalimantan di Banjarmasin.²⁴

Pada tahun yang sama pula, Idham dicalonkan oleh Badan Kordinasi Partai-partai Republikan (SKI, Sermi, Gappika) sebagai Anggota Dewan Daerah Banjar untuk daerah pemilihan Amuntai Utara. Pemilihan ini diadakan Belanda dalam rangka *Plebeseit*²⁵ untuk mendirikan Negara Kalimantan. Negara Kalimantan akhirnya gagal didirikan Belanda karena calon-calon yang didukungnya kalah dalam Plebeseit tersebut. Pada bulan Maret 1950, Idham

dan tenaga pejuang asal Kalimantan yang berada di pulau Jawa. Secara resmi kesatuan ini dilantik tanggal 4 April 1946 oleh Laksamana Muda M. Nasir dan bermarkas Mojokerto (kemudian pindah ke Tuban). 15 Nopember 1946 utusan ALRI DIVISI IV Mojokerto ke Kalimantan menemui Hassan Basry untuk menyampaikan tugas yang diberikan padanya, yakni menyiapkan satu batalyon ALRI DIVISI IV di Kalimantan. Tugas itu dilakukan dengan cara meleburkan banyak organisasi dan badan-badan perjuangan. Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, h. 36.

²⁴ *Ibid.*, h. 36.

²⁵ Pemungutan suara umum secara langsung pada suatu daerah untuk menentukan status daerah yang bersangkutan. Lih. Pius A. Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*. (Surabaya: Arkola, 1994), h. 603.

diangkat menjadi Anggota Parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS), mengganti anggota-anggota yang semula dipilih oleh Dewan Daerah Banjar, namun dibatalkan. Kemudian ia menjadi anggota Parlemen Sementara Negara Kesatuan sampai tahun 1955, mewakili Kalimantan.

Salah satu faktor yang membuatnya bertahan lama sebagai Ketua Umum NU, adalah kedekatannya dengan salah seorang Rais ‘Aam PBNU yang sangat besar pengaruhnya dalam berpisahannya NU dari Masyumi, yakni Wahab Chasbullah. Idham sering menemani beliau “safari” rutin ke cabang-cabang NU pada awal tahun 1950-an.²⁶

Ahmad Muhajir, menyebutkan bahwa Idham diangkat menjadi anggota Parlemen Sementara (DPRS) 1950 sebagai wakil Masyumi.²⁷ Ketika NU memisahkan diri dari Masyumi, Idham memilih terlibat di NU dan aktif dalam melakukan proses konsolidasi ke dalam, antara lain dengan menjadi anggota Majelis Pertimbangan Politik PBNU yang pada garis besarnya bertugas mengikuti perkembangan politik di tanah air, membuat analisa, dan menyimpulkannya untuk diserahkan kepada PBNU, sebagai suatu saran atau usul. Majelis ini dibentuk pada 2-3 September 1951.²⁸

Pada awal 1950-an, Idham sering menemani Wahab Chasbullah, Rais ‘Aam PBNU yang sangat besar pengaruhnya dalam berpisahannya NU dari

²⁶ Ahmad Muhajir, *Idham Chalid*, h.38.

²⁷ Martin van Bruinessen, *NU, Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. (Yogyakarta: LKIS, 1994), h. 231, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Muhajir, *Idham Chalid....*, h.37.

²⁸ Ahmad Muhajir, *Idham Chalid....*, h. 37. Bandingkan dengan Saifuddin Zuhri, *Berangkat dari Pesantren*. (Jakarta: Gunung Agung, 1987), h. 397.

Masyumi, mengikuti “safari” rutin ke cabang-cabang NU. Wahab inilah yang memiliki peranan penting dalam karir Idham di NU. Dengan kelihaiannya Wahab, namun penuh kehati-hatian, serta faktor insting politik yang tajam membuat Idham mengalami kemajuan pesat di bawah bimbingannya; dengan belajar banyak mengenai teknik berorganisasi, berdebat dan berpidato, sambil juga membangun jaringan dukungan sendiri dalam partai. Kedekatan dengan Wahab inilah yang antara lain membuatnya bertahan lama sebagai Ketua Umum.²⁹

Idham Chalid memulai kariernya di Jakarta dengan aktif di gerakan Pemuda Ansor, kemudian sebagai ketua PB Ma’arif, suatu organisasi yang berafiliasi kepada NU dengan konsentrasi pada penanganan masalah pendidikan di tahun 1952. Pada tahun yang sama, ia diangkat PBNU menjadi Sekretaris Jendral partai, dan dua tahun kemudian, ia terpilih sebagai wakil ketua. Selama masa kampanye Pemilu 1955, ia memegang jabatan penting sebagai Ketua Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama (Lapunu).³⁰

Dalam Demokrasi Parlementer, pemilu merupakan alat uji utama bagi sebuah partai politik. Keberhasilan dalam pemilu akan memberikan kekuasaan

²⁹ Ahmad Muhajir, *Idham Chalid...*, h. 38.

³⁰ *Ibid.*, h. 39. Lihat juga Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat hidup, Karya, dan Sejarah perjuangan 157 Ulama Nusantara*. (Jakarta: Gelagar Media Indonesia), h. 400. Lapunu (Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama), sebuah dewan khusus yang menangani pemilu bagi partai NU yang dibentuk bulan Mei 1953. Lapunu bertanggung jawab menangani segala permasalahan yang berhubungan dengan pemilu, termasuk pengaturan logistik, pelatihan juru kampanye, perumusan strategi, penyusunan dan pemeriksaan (*Screening*) daftar para calon, pengumpulan dana, hubungan dengan pejabat yang berwenang, dan mengumpulkan hasil pemungutan suara. Struktur Lapunu menyerupai NU, dengan dewan pengurus dari tingkat nasional hingga cabang-cabang NU di daerah. Mohammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah, Istilah, Amaliah, Uswah*. (Surabaya: Khalista, 2007), h.74-75. Sebelum dijabat Idham tahun 1954, posisi ketua ditempati oleh Saleh Surjaningprojo.

dan pengaruh serta kesempatan untuk menentukan arah kehidupan bangsa, sebaliknya kegagalan dalam pemilu akan mengakibatkan marginalisasi dan ketergantungan pada pihak lain. Sementara pemilu 1955 adalah ujian pertama bagi NU yang pada tahun 1952 keluar dari Masyumi dan mendirikan partai politik sendiri. Walaupun pemilu tersebut juga yang pertama kali dihadapi semua partai peserta, namun partai-partai lain, khususnya partai-partai besar mempunyai lebih cukup waktu dan kesempatan menanamkan pengaruh politik kepada rakyat. Akan halnya NU, partai ini hanya memiliki waktu yang singkat: 3 tahun. Dengan demikian, Ketua Lapunu memiliki tugas penting bagi partai di kancah politik selanjutnya. Dan, terpilihnya Idham menjadi anggota DPR pada Pemilu 1955 dengan tiket NU adalah konsekuensi logis belaka.

Ahmad Muhajir mengutip pendapat Alfian yang menyatakan bahwa dalam pemilu yang pertama kali diselenggarakan ini NU meraih keberhasilan yang mengejutkan, bahkan bagi pihak NU sendiri. Dari hanya delapan kursi Parlemen yang dimiliki, NU berhasil mencapai prestasi sebagai empat besar, dengan 45 kursi. Total suara yang dikumpulkan NU pada Pemilu 1955 sebesar 6.955.141 (18,4%) dari total suara pemilih sebesar 37.785.299. Keberhasilan ini dinilai oleh Alfian karena kemampuan NU dalam menggalang solidaritas di lingkungan kaum santri dan itu berarti memperjelas perjuangan mereka untuk memenangkan ideologi Islam dan sekaligus menunjukkan sikap anti komunis. Dari segi ini nampaknya tiga pilar utama yang menyangga kekuatan NU yaitu ulama, pesantren, dan politisi memegang peranan penting dalam keberhasilan NU menjalani pemilihan umum itu. Ali Haidar menambahkan bahwa faktor utama

keberhasilan NU pada Pemilu ini adalah tema dan metode kampanye yang digunakan NU terbukti sangat efektif.³¹

Jumlah kursi yang diduduki oleh NU di parlemen meningkat, hal tersebut menjadikan pengaruh NU semakin besar dalam pembentukan kabinet. Hal ini sangat jauh berbeda saat NU masih bergabung dengan Masyumi yang pada waktu itu NU hanya berharap mendapatkan jatah Menteri Agama, bahkan terkadang harus bersaing dengan golongan muslim modernis untuk posisi tersebut. Pada tahun 1956, lima menteri menjadi jatah NU dalam Kabinet Ali Sastroamijoyo II, termasuk Wakil Perdana Menteri yang diserahkan pada Idham.

Ahmad Muhajir menyebutkan bahwa Fealy menilai, naiknya Idham Chalid ke jabatan Wakil Perdana Menteri merupakan hal yang luar biasa. Dengan usianya yang baru 35 tahun, dan tanpa pengalaman sebagai menteri, pengangkatannya mencerminkan bahwa NU tidak hanya menaruh harapan besar terhadap perkembangan karir Idham, tetapi juga tidak mempunyai calon lain yang layak. Idham menyatakan bahwa pada awalnya ia enggan untuk menerima jabatan itu dan mengusulkan Dachlan sebagai gantinya. Akan tetapi, ia dibujuk Ali Sastroamijoyo untuk menerima penunjukan itu.³²

Pada Muktamar NU ke-21 yang diselenggarakan di Ibukota Sumatera Utara, Medan, di bulan Desember tahun 1956, Idham terpilih sebagai Ketua

³¹ Ahmad Muhajir, *Idham Chalid...*, h. 41. Lihat juga Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia, 1986), h.33; dan Mahrus Irsyam, *Ulama dan Politik, Upaya Mengatasi Krisis*. (Jakarta: Yayasan Pengkhidmatan, 1984), h. 83-131, dikutip dari Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia, Pendekatan Fikih dalam Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustataka Utama, 1998), h. 170.

³² Ahmad Muhajir, *Idham Chalid...*, h. 41-42.

Umum PBNU. Ia dengan telak mengungguli Mohammad Dachlan yang telah memegang jabatan tersebut sejak April 1953. Pesatnya perkembangan karirnya sangat mengagumkan mengingat bahwa ia berbeda dengan para pengurus PBNU lainnya, ia bukan orang Jawa dan merupakan lulusan Pesantren Modern Gontor di Ponorogo, lembaga yang tidak punya kaitan dengan NU dan oleh banyak ulama banyak dipandang sebagai tulang punggung modernisme Islam.³³

Selain memberikan kesempatan kepada Idham untuk menjadi ketua umum PBNU pada tahun 1956, jauh-jauh hari sebelumnya NU sudah menghilangkan jarak pemisah antara Jawa dengan Luar Jawa dengan menggelar Mukhtamar ke-11 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tahun 1936 atau sembilan tahun sebelum Indonesia merdeka. Penyelenggaraan Mukhtamar ke-11 di Banjarmasin pada tahun 1936 serta dipilihnya Idham Chalid menjadi ketua umum PBNU pada Mukhtamar ke-21 di Luar Jawa, tepatnya di Medan, Sumatera Utara, semakin mengukuhkan posisi NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia serta meminjam istilah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai jangkar strategis nasional.

Kepemimpinan Idham di PBNU selain berdampak positif bagi iklim organisasi dengan mematahkan mitos Jawa dan Luar Jawa juga menghapus mitos bahwa ketua umum PBNU harus memiliki darah biru. Darah biru merupakan istilah dalam NU, yang dapat diartikan sebagai keturunan ulama besar yang terpendang. Dalam tradisi NU di Jawa, biasanya dipanggil dengan sebutan Gus. Uniknyanya, Idham selain bukan berasal dari Jawa juga bukan merupakan anak

³³ *Ibid.*, h. 43.

ulama besar terpendang, bahkan di Kalimantan Selatan sekalipun. H Muhammad Chalid, ayah Idham, hanya berprofesi sebagai penghulu di pelosok Amuntai, Hulu Sungai Tengah, sekitar 200 km dari Banjarmasin.³⁴

Keluasan pergaulan, kemahiran retorika serta kepiawan dalam melobi mengantarkan Idham sebagai tokoh besar pemimpin nasional baik di masa Orde Lama maupun Orde Baru. Jabatan ini terus dipertahankannya hingga diminta mundur pada tahun 1982 oleh para kiai. Secara keseluruhan, Idham Chalid memimpin NU selama delapan periode dalam waktu hampir tiga dekade.³⁵

Pertikaian partai-partai di Parlemen dan kabinet, perdebatan di konstituante, dan pergolakan di beberapa daerah yang melibatkan pimpinan-pimpinan militer dan akhirnya manuver-manuver politik Soekarno yang hendak mendirikan Demokrasi Terpimpin. Hal tersebut terjadi pada tahun 1956-1957, yang merupakan tahun penuh dengan pergolakan politik di negara ini. Harapan besar masyarakat terhadap wakil-wakilnya di parlemen dan pemerintahan hanya menjadi angan-angan kosong. Kabinet hasil Pemilu pun tak bertahan lama sampai

³⁴ Lihat Anonim, *Kiai Idham Chalid Pemimpin Besar dari Amuntai*, <http://gp-ansor.org/biografi/>, diakses tanggal 4 April 2013.

³⁵ Sementara Idham, sejak diangkat menjadi Ketua Umum PBNU telah mengubah jalur administrasi kepengurusan dengan menjadikan rumahnya sebagai kantor. Dengan kata lain, Idham mengendalikan NU dari rumahnya. Ia bukan orang yang secara ketat menjalankan aturan-aturan organisasi layaknya Dachlan (Ketua Tanfidziyyah sebelumnya), melainkan suka memberi bantuan kepada siapapun yang datang, baik berupa materi, nasihat atau rekomendasi. Dengan sifat yang ringan tangan dan menggunakan kedudukannya untuk menolong siapa saja, ia membuat jaringan patronase yang sangat berguna baginya karena banyak yang merasa berhutang padanya secara pribadi, bukan kepada NU. Kharismanya membuat orang yang berhubungan dengannya merasa nyaman dan ia mendapat julukan ahli yahannu, istilah sehari-hari di kalangan pesantren yang berarti 'mengatakan hal-hal yang menyenangkan orang, menyampaikan apa yang ingin mereka dengar'. Gaya kepemimpinan seperti inilah yang membuatnya bertahan lama di jajaran teratas tanfidziyyah (eksekutif) NU. Lihat Greg Fealy, *Ijtihad...*, h. 232. Lihat juga Secara kritis hal ini dibahas dalam Martin van Bruinessen, *NU*, terutama halaman 115-149.

ketika Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya pada Presiden 14 Maret 1957. Dalam pembentukan Kabinet selanjutnya, Idham Chalid terpilih kembali sebagai wakil NU pada Kabinet pimpinan Djuanda sebagai Wakil Perdana Menteri. Jabatan ini dipegangnya sampai jadi momen yang mengubah secara total konfigurasi politik dan arah pembangunan demokrasi politik di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada bulan Juli 1959. Dekrit 1959 seringkali dipatok sebagai titik dimulainya masa Demokrasi Terpimpin.³⁶

Sebulan sesudah Soekarno mengumumkan Dekrit, pada bulan Agustus, Idham diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Badan ini berfungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden dan Pemerintah, dan pada saat itu nampak lebih berpengaruh dari pada parlemen. Oleh Bruinessen pengangkatan Idham menjadi anggota DPAS ini adalah karena kedekatannya dengan Soekarno, sebagaimana mayoritas tokoh-tokoh NU lainnya. Idham bahkan menjadi pembela blak-blakan dari manifesto ideologis nasionalistik populis Soekarno, Manipol Usdek. Pada 1964, Idham dan Saifuddin Zuhri, Menteri Agama, mendirikan sebuah Yayasan (Jajasan Api Islam) yang fungsi utamanya nampaknya adalah mempropagandakan gagasan-gagasan Soekarno di kalangan Muslim Tradisional.³⁷

Kiai Wahab Chasbullah, yang saat itu masih menjabat Rais ‘Aam, adalah seorang pengagum Soekarno dan tetap menjadi pendukung setia sampai akhir. Tokoh NU ini juga dikenal dekat dengan Soekarno. Demikian pula beberapa

³⁶ Ahmad Muhajir, *Idham Chalid...*, h. 44.

³⁷ *Ibid.*,

pimpinan puncak lainnya seperti Masjkur, Zainul Arifin, Saifuddin Zuhri, Ahmad Sjaichu, juga Jamaluddin Malik. Soekarno secara berkala mengundang mereka ke istana untuk menghadiri acara kenegaraan atau berdiskusi mengenai masalah agama dan politik. Diskusi itu juga meliputi isu nasional dan pribadi. Kiai Wahab juga mengatakan bahwa ia sering memberikan nasihat spiritual kepada Soekarno.³⁸

Idham menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara di tahun 1960.³⁹ Tugasnya antara lain membuat Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Di dalam sejarahnya, penyusunan GBHN ini didasarkan pada pidato-pidato Presiden Soekarno, yaitu pidato pada 17 Agustus 1959, atau yang biasa disebut Manifesto Politik, pidato di depan Dewan Perancang Nasional pada 28 Agustus 1959, pidato 17 Agustus 1960, dan pidato di depan Sidang Umum PBB pada 30 September 1960. Setelah MPRS membahas keempat pidato tersebut, kemudian memperkuatnya dan meresmikannya menjadi GBHN. Hal ini antara lain karena belum pernah ada preseden tentang bagaimana pembentukan GBHN dan dari mana saja bahan-bahannya dicari. Perlu dicatat bahwa MPRS tidak mempunyai staf ahli yang dapat dimintai bantuannya.⁴⁰

Selain itu, suasana politik pada waktu itu didominasi oleh Presiden Soekarno yang dipuji-puji dan diagung-agungkan karena dekritnya tanggal 5 Juli 1959 telah berhasil menyelamatkan negara Pancasila dari jurang kehancuran.

³⁸ *Ibid.*, h.45.

³⁹ Bibit Suprpto, *Ensiklopedi...* h. 400.

⁴⁰ Ahmad Muhajir, *Idham Chalid...*, h. 46.

Posisi Wakil Perdana Menteri Kedua kembali dijabat Idham pada tahun 1966 dalam jajaran Kabinet Dwikora hasil reshuffle, walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek, hanya empat bulan. Jabatan ini pula yang terakhir diduduki Idham di masa Orde Lama. Anggota MPRS yang berjumlah lebih dari 500 orang pada waktu itu merupakan suatu jumlah yang besar karena belum pernah ada lembaga negara yang sedemikian besar jumlah anggotanya. Mereka berasal dari berbagai lapisan masyarakat, dan sebagian besar dari mereka belum pernah menangani masalah-masalah politik kenegaraan. Rupa-rupanya bagi keanggotaan MPRS yang pertama ini yang diutamakan adalah pencerminan masyarakat dari pada kemampuan, atau keterampilan di bidang politik kenegaraan.

Pada Kabinet Orde Baru yang pertama Idham diangkat menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat dalam kurun waktu 1967 hingga 1970. Kemudian dia menduduki posisi Menteri Sosial di tahun 1970 sampai 1971. Ini adalah sebuah pembuktian bahwa walaupun Idham mempunyai hubungan dekat dengan Orde Lama, dia tetap dianggap penting oleh pemerintah Orde Baru hingga dua kali menjabat dalam Kabinet.⁴¹

NU akhirnya bergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan di tahun 1973, hal ini dikarenakan pada tahun 1971, Pemilu pertama di masa Orde Baru dilangsungkan. Pemilu ini merupakan yang kedua sekaligus yang terakhir bagi partai Nahdlatul Ulama karena Pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai yang lebih ekstrim dari yang dilakukan Soekarno.

⁴¹ Martin van Bruinessen, *NU...*, h. 291. Sebagaimana dikutip dari Ahmad Muhajir, *Idham Chalid....*, h.

Kebijakan tersebut ditempuh melalui fusi atau penggabungan beberapa partai yang memiliki kedekatan atau kesamaan ideologi. Hal ini dilakukan oleh Orde Baru sebagai bagian dari programnya menata kehidupan berpolitik.

Idham Chalid diberi kedudukan bergengsi, namun tidak sangat berpengaruh, sebagai presiden partai sampai tahun 1989. Hal ini tentu saja merugikan Nahdlatul Ulama karena perolehan suara yang didapatnya di Pemilu 1971 tidak melorot, melainkan naik 0,2 persen. Jika pada 1955 NU meraih 18,4% maka pada Pemilu ini NU mendapatkan 18,6% atau 10,2 juta lebih suara dari total pemilih 54.696.887. Penggabungan menjadi PPP muncul sebagai kenyataan yang harus diterima bagi kebanyakan politisi NU; Idham Chalid dan kawan-kawan terdekat langsung menerima campur tangan yang sangat jauh ini tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan anggota PBNU lainnya. Dapat dimengerti, hal ini menyebabkan munculnya ketidakpuasan di lingkungan NU, tetapi semua tampaknya setuju untuk berbuat yang terbaik dalam kondisi baru ini daripada menentang secara aktif.

Dalam masa bhakti 1971-1977, Idham dipilih menjadi Ketua DPR dan MPR sesudah Pemilu 1971. Jabatan terakhir yang dipegangnya adalah sebagai Ketua DPA. Jabatan ini tidak lagi punya pengaruh besar dalam kehidupan bernegara, dan sering dianggap posisi kehormatan bagi para pejabat tinggi atau tokoh politik sebelum dipensiunkan.

D. Karya, Publikasi, dan Penghargaan untuk Idham Chalid

Idham menulis untuk *Duta Masyarakat*, sebuah koran milik Nahdlatul Ulama. Satu artikel yang cukup penting berkaitan dengan aktivitas dan pemikirannya di masa Demokrasi Terpimpin berjudul “Haluan Politik” yang diterbitkan tahun 1965 oleh majalah “Api Islam”. Meskipun Idham bukanlah seorang penulis produktif dan kemampuan menulisnya tidak sebaik performanya ketika berpidato, tidak berarti tidak ada karya yang dihasilkannya. Beberapa judul tulisan tersebut di atas membuktikannya.⁴²

Idham menghasilkan sebuah naskah yang akhirnya diterbitkan sewaktu ia dipenjara pada tahun 1949. Judulnya “Bertamasya ke Cakrawala”, dan diterbitkan atas kerja sama dengan Haspan Hadna, Pemimpin redaksi “Indonesia Berjuang”, karya ini dihasilkan sewaktu masih aktif di pergerakan kemerdekaan di Kalimantan.⁴³

Sebuah karya tentang Parlemen yang disusun sewaktu ia menjadi anggota DPRS mewakili Kalimantan. Buku tersebut berjudul “Parlemen, Organisasi, dan Tjara Bekerdjanja” dengan Astanabuku Abede Semarang sebagai penerbitnya. Diterbitkan tahun 1951, dan menjadi semacam buku panduan memahami apa itu parlemen dan bagaimana fungsinya dalam kehidupan bernegara. Tentu saja parlemen yang dimaksud adalah parlemen di alam demokrasi liberal, yakni saat partai-partai begitu berkuasa. Idham tidak cuma membicarakan hal-hal teknis di

⁴² Bibit Suprpto, *Ensiklopedi...*, h. 402.

⁴³ Ahmad Muhajir, *Idham Chalid...*, h. 48-50.

sini, tetapi ada juga tinjauan historis dan pengalaman negara-negara lain dalam menjalankan Demokrasi.

Ada pula booklet yang berjudul “Islam dan Demokrasi Terpimpin” yang ditulis oleh Idham Chalid sebagai bahan-bahan kuliah yang disampaikannya di Perguruan Tinggi Islam Nahdlatul Ulama Surakarta. Diterbitkan di Jakarta oleh Endang-Pemuda di tahun 1965. Buku ini menyiratkan pemikirannya dan usahanya memahami Demokrasi (Terpimpin) dari perspektif agama.

Buku lainnya berjudul “Mendajung dalam Taufan,” yang berisi beberapa pidato di berbagai pertemuan resmi seperti muktamar dan pernyataan sikap NU. Buku ini bagian dari dokumentasi resmi NU di masa-masa menjelang dan berlakunya Demokrasi Terpimpin. Diterbitkan tahun 1966 oleh penerbit Jakarta: Endang-API Islam.

Bintang Gerilja dari Presiden Soekarno tahun 1956 atas perjuangannya sewaktu bersama-sama dengan kaum gerilyawan di Kalimantan; Bintang Vendera Yugoslavia dari Presiden Tito di tahun 1958; Bintang R. P. A. el-Gumhuriyah Tingkat I tahun 1959; dan Bintang Mahaputra dari Presiden Soekarno di tahun 1960, merupakan sebagian penghargaan terkait dengan aktivitasnya.⁴⁴

Mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar Mesir, dalam Pengetahuan Islam dan Perdjungan Islam pada tahun 1959, dan menjadi Ketua Dewan Kurator Institut Agama Islam Negeri tahun.⁴⁵

⁴⁴ kabarhaji.com/.../kh-idham-chalid-kiprah-ulama-dan-politisi-handal-nusantara. Diakses pada 30 Mei 2012.

⁴⁵ Mohammad Subhan, *Antologi NU I...*, h. 227.

E. Gaya Kepemimpinan: Kesamaan, Pengaruh dan Keyakinan Idham Chalid

Dalam beberapa hal, Idham Chalid memiliki beberapa kesamaan dengan Presiden Soekarno. Kesamaan ini besar artinya dalam hubungan kedua tokoh ini dalam perjalanan politik, baik Idham dan NU. Pengaruh yang juga tidak kalah pentingnya berasal dari Kiai Wahab Chasbullah. Cukup aman untuk mengatakan bahwa gaya berpikir dan bersikap Idham sangat dipengaruhi oleh Rais ‘Aam NU tersebut.⁴⁶

Soekarno lebih suka mengatur taktik dan strategi politiknya sendiri. Ia tidak mempunyai partai yang selalu menyokongnya tetapi mengandalkan karisma dan kemampuan membaca situasi dengan cerdas. PNI yang dulu didirikannya tidak lagi menjadi partainya sesudah kemerdekaan. Kemampuannya memanipulasi dan bermain di antara partai-partai besar dan militerlah yang membuatnya berhasil mendirikan sistem Demokrasi Terpimpin. Ini menunjukkan bahwa baik Idham maupun Soekarno memiliki gaya kepemimpinan yang mempribadi (*personalized*).⁴⁷

Sementara Idham, sejak diangkat menjadi Ketua Umum PBNU telah mengubah jalur administrasi kepengurusan dengan menjadikan rumahnya sebagai kantor. Dengan kata lain, Idham mengendalikan NU dari rumahnya. Ia bukan orang yang secara ketat menjalankan aturan-aturan organisasi layaknya Dachlan (Ketua Tanfidziyah sebelumnya), melainkan suka memberi bantuan kepada siapa

⁴⁶ Ahmad Muhajir, *Idham Chalid...*, h. 51.

⁴⁷ *Ibid.*,

pun yang datang, baik berupa materi, nasihat atau rekomendasi. Dengan sifat yang ringan tangan dan menggunakan kedudukannya untuk menolong siapa saja, dengan sendirinya ia membuat jarring-jaring patronase yang sangat berguna baginya karena banyak yang merasa berutang padanya secara pribadi, bukan kepada NU. Kharismanya membuat orang yang berhubungan dengannya merasa nyaman dan ia mendapat julukan yahannu, istilah sehari-hari di kalangan pesantren yang berarti “mengatakan hal-hal yang menyenangkan orang, menyampaikan apa yang ingin mereka dengar”. Gaya kepemimpinan seperti inilah yang membuatnya bertahan lama di jajaran teratas tanfidziyyah (eksekutif) NU.⁴⁸

Sudah banyak cerita mengenai kehebatan Soekarno apabila dia sedang berorasi. Ia mampu memesona para pendengarnya, dan memainkan emosi mereka. Ucapan-ucapan bisa membangkitkan gelora semangat orang banyak. Dengan kata lain, Soekarno adalah seorang singa podium yang kekuatan retorikanya mungkin hanya bisa disaingi oleh pimpinan Sarekat Islam (SI) Tjockroaminoto, guru, induk semang, dan juga mertuanya. Ini merupakan bukti bahwa baik Soekarno maupun Idham adalah orator ulung.⁴⁹

Idham lebih kalem, namun sama dasyatnya. Bukannya membangkitkan semangat, melainkan ia tahu menghadapi emosi massa dan mendatangkan simpati. Ia orang yang diplomatis. Selalu terlihat tenang, dan seringkali membuat orang yang marah menjadi tak berkutik.

⁴⁸ *Ibid.*, h.52.

⁴⁹ *Ibid.*, h.53.

Ahmad Muhajir menyebutkan Fealy mencatat bahwa kepribadian dan gaya kepemimpinan Idham sebagai seseorang yang ahli dalam berkomunikasi, punya banyak lelucon, dan sangat pandai membaca suasana hati pendengarnya. Kemampuannya menyenangkan hati dan menggerakkan massa membuatnya menjadi salah satu pembicara NU yang paling populer. Pidato-pidatonya merupakan perpaduan dari khotbah keagamaan, dongeng, dan propaganda politik yang selalu disampaikan dengan cara yang menyejukkan dan penuh kerendahan hati.⁵⁰

Kalau mau dianalogkan dengan jurus pesilat; Soekarno menyerang dengan jurus yang keras dan gesit, Idham menyambut serangan dengan jurus lembut, namun mematikan.⁵¹ Walaupun dalam konteks politik hal ini tidak serta merta menjadi faktor yang menyebabkan Idham lebih bersepakat dan mendukung gagasan-gagasan Soekarno. Secara umum, seperti kesimpulan Fealy, cukup alasan untuk mempercayai hubungan Soekarno dan tokoh-tokoh NU terutama didasarkan atas kepentingan bersama, dan bahwa NU, terlepas dari rasa hormatnya pada Soekarno, tidak akan memberikan dukungannya kepada presiden tersebut bila tidak mendapat keuntungan.

⁵⁰ *Ibid.*,

⁵¹ *Ibid.*,

Selain beberapa kesamaan di atas, seperti kebanyakan orang NU lainnya, dan juga mayoritas rakyat Indonesia saat itu, dia memiliki kekaguman dan rasa hormat yang besar terhadap Presiden Pertama RI ini.⁵²

Idham menjadi pendukung Soekarno, terutama di masa Demokrasi Terpimpin dilaksanakan, demi menjaga agar NU, dan dirinya terus bisa bermain di tengah-tengah arena politik, sekalipun bukan menjadi pemain utama bahkan nyaris terhimpit di antara segi tiga: Soekarno, militer, dan PKI. Pada masa itu, Idham menduduki posisi sebagai anggota DPA, dan Front Nasional dan wakil ketua MPRS. Ali Haidar menjelaskan, meskipun politik akomodasi atau penyesuaian diri harus dilakukan, hal ini karena pertimbangan ketidaksiapan umat pendukung untuk melakukan oposisi terhadap pemerintah. Akan tetapi, dalam berbagai hal NU mampu tampil dengan menggunakan posisi politiknya sebagai “orang dalam pemerintah” untuk melawan agitasi dan aksi sepihak PKI di banyak tempat, suatu hal yang menurut NU tak mungkin dilakukan jika NU melawan pemerintah, dicap kontra revolusi atau reaksioner. Hal ini pun diakui oleh Njono, gembong PKI, yang mengatakan bahwa “NU sangat menyulitkan PKI.” Dikatakan reaksioner, nyatanya NU petani, buruh kecil, dan dicintai rakyat. Menurut Njono, NU juga menyulitkan PKI karena posisinya yang dekat dengan Presiden Soekarno.⁵³

Perjalanan politiknya sering digambarkan seperti “mendayung dalam taufan,” atau “meniti buih”. Hal ini disebabkan karena beberapa karakteristiknya

⁵² *Ibid.*, h.54.

⁵³ *Ibid.*, h.55.

yang lain adalah penghormatan, dan penghargaan yang begitu besar terhadap para ulama baik yang pernah menjadi gurunya ataupun tidak. Ia juga sering digambarkan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik, sikapnya luwes dan cenderung menghindari konflik yang tidak perlu. Ia juga memiliki insting politik yang baik, pintar “membaca angin” dan karenanya cenderung pragmatis dalam bersikap.⁵⁴

Bagi Idham, berpolitik semestinya berorientasi kepada kemaslahatan, dan berguna bagi orang banyak, dan karenanya tidak mesti ngotot-ngototan atau kaku dalam bersikap. Ia menggambarkan seorang politisi yang baik mestilah memahami “filosofi air”.⁵⁵

Air apabila dimasukkan pada sebuah gelas maka ia akan berbentuk gelas, bila dimasukkan ke ember akan berbentuk ember. Apabila dibelah dengan benda tajam, ia terputus sesaat dan cepat kembali ke bentuk asalnya. Dan, air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Apabila disumbat dan dibendung ia bisa bertahan, bergerak elastic mencari resapan. Bila dibuatkan kanal dia mampu menghasilkan tenaga penggerak turbin listrik serta mampu mengairi sawah dan tanaman sehingga berguna bagi kehidupan makhluk di dunia.⁵⁶

Sikap-sikapnya yang disebutkan ini menjadi kekuatan sekaligus kelemahannya, yang darinya Idham banyak mendapat kritik. Karena sikap ini, Idham terus berada di posisi Ketua Umum PBNU dalam waktu yang lama,

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

⁵⁶ *Ibid.*, h.56.

mendapat posisi di pemerintahan dan berbagai Lembaga Negara sejak Orde Lama hingga Orde Baru. Di sisi yang lain para pengkritiknya menganggap sikap ini tidak layak dan seperti tidak memiliki prinsip. Para pemimpin Ansor, misalnya menjuluki Idham “politisi gabus” karena apa pun yang terjadi di sungai politik, “dia selalu mengambang di atas”. Mengenai keluwesan sikap Idham, Mahbub Junaidi menyatakan kepada rekan-rekannya bahwa Idham akan dapat dengan mudah menjadi wakil perdana menteri dalam pemerintahan Aidit hingga Soekarno.⁵⁷

Latar belakangnya yang seorang guru membuatnya santun dalam berpolitik, mampu tenang berhadapan dan “bekerja sama” dengan musuh politik seperti Aidit dan PKI-nya. Ia juga sangat dipengaruhi Wahab Chasbullah, Rais ‘Aam Nahdlatul Ulama, yang perannya sangat kuat dalam pembentukan karakter NU dan arah kebijakan partai. Dominasi Wahab dalam partai selama akhir 1950-an memperlihatkan bahwa sikap pragmatis tidak hanya wajar secara politik, tetapi dibenarkan secara keagamaan.⁵⁸

Fealy – dalam Ahmad Muhajir – menyebutnya “luwes” dalam bersikap dan ini menjadi ciri khasnya yang mewarnai NU terutama di akhir tahun 50-an, dan awal 60-an. Sikap ini didasarkan pada beberapa prinsip dalam hukum Islam, antara lain: pertama, *mâ lâ yudraku kulluh lâ yutraku kulluh*⁵⁹ (kewajiban yang

⁵⁷ *Ibid.*, h.57.

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ Periksa juga Abd al-Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliah fi Ushu al-Fiqh wa al-Qawaid a-Fiqhiah*, (Jakarta: Maktabah al-Saadiyah Putra, tth), h.53.

tidak mungkin diwujudkan secara utuh tidak boleh ditinggalkan semua); kedua, *dar' al-mafâsid muqaddam 'alâ jalb al-mashâlih*⁶⁰, (mendahulukan upaya menghindari bahaya atau kerusakan ketimbang meraih kemaslahatan); ketiga, *idzâ ta'âradha mafsadatâni ru'ya a'zhamuhumâ dhararan bi irtikâbi akhaffihima*⁶¹ (apabila terjadi kemungkinan kompilasi bahaya maka dipertimbangkan bahaya yang paling besar resikonya dengan melaksanakan yang paling kecil resikonya).⁶²

Di pihak Soekarno, ia mempunyai keinginan keras untuk memperluas pengaruhnya lebih dari yang telah ditetapkan dalam konstitusi 1950, dan ia menganggap NU layak dijadikan pendukung keterlibatannya yang lebih luas dalam politik. Setelah Masyumi mengecewakan Soekarno maka hanya NU kekuatan real dan representative kelompok Agama bagi konsep persatuan Nasakom yang dibangun oleh Soekarno. Soekarno akan menerima dengan senang hati pembelaan partai Islam itu terhadap kabinet presidensialnya dan pemerintahannya yang kuat.⁶³

Sampai gerakan 30 September yang menghebohkan itu, ketika posisi Soekarno dipertanyakan dalam kejadian itu, Idham masih setia kepada Soekarno dan ia harus berhadapan dengan kaum muda NU militan yang membenci sikap akomodatifnya. Kaum muda ini berperan banyak dalam pembantaian missal

⁶⁰ Lihat As-Syaikh Abdullah bin Said Muhammad Ibadi al-Hadhromi asy-Syahari, *Idhoh al-Qawaid al-Fiqiah*, (ttp: al-Haramain, tth), h. 44. Periksa juga Abd al-Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliah ...*, h.34.

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Lihat Ahmad Muhajir, *Idham Chalid....*, h.58.

⁶³ *Ibid.*,

terhadap PKI, memiliki kecenderungan untuk memuluskan transisi menuju Orde Baru dan membuka jalan penyerahan kekuasaan ke tangan Suharto. Hanya di saat-saat terakhir ketika Soekarno dengan keras kepala terus mempertahankan pendapatnya tentang posisi kaum komunis dalam arah kehidupan bernegara, dan tampak tidak bersimpati pada korban kudeta dengan menyebut kejadian itu hanyalah “buih di lautan revolusi”, serta perlindungannya terhadap beberapa menteri yang dicurigai terkait dengan peristiwa itu; saat angin perubahan politik bertiup kencang meninggalkan Soekarno, Idham terpaksa meninggalkannya dan mempertahankan NU melewati transisi kekuasaan ini.⁶⁴

Ketika partai-partai Islam berfusi dalam Partai Persatuan Pembangunan, pada tanggal 5 Januari 1973, mantan guru agama Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo ini menjadi ketua, sekaligus Presiden PPP. Dari sisi wawasan keilmuan dan kemahiran, sosok Idham Chalid dikenal sebagai ulama yang mahir berbahasa Arab, Inggris, Belanda, dan Jepang. Ia juga menyandang gelar doctor honoris causa dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Idham Chalid merupakan khazanah yang tak ternilai bagi bangsa ini.

KH Hasyim Muzadi, ketua umum PBNU 1999-2010 mengemukakan kekagumannya pada sosok Idham karena berhasil memimpin PBNU selama 28 tahun. Selain kagum, Hasyim juga mengaku ‘iri’ pada Idham, karena selama 28 tahun menjadi ketua umum PBNU tanpa ada gejolak berarti. “Sebagai ketua umum PBNU, saya termasuk orang yang mengagumi beliau, karena memimpin

⁶⁴ *Ibid.*, h.59.

NU selama 28 tahun dan tidak ada gejolak dalam NU selama beliau memimpin. Ini sangat sulit. Kalau saya, memimpin NU 8 tahun saja ruwetnya bukan main,” katanya.

Dikatakannya, Kiai Idham Chalid juga telah berhasil membawa NU keluar dari masa-masa pelik, bahkan genting saat Indonesia masih berusia muda dengan dinamika politik yang luar biasa. Pada tahun 1952 NU keluar dari Masyumi dan mendirikan partai NU. Selanjutnya, tahun 1955 yang penuh gejolak karena demokrasi liberal berjalan selama 4 tahun dan tahun 1959 masuk dekrit presiden. Lalu tahun 1960 Bung Karno menjalankan Manipol Usdek yang berjalan 5 tahun sampai pertengahan tahun 1966. Suasana krisis juga belum berakhir karena terjadinya pergantian kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Tahun 1967-1969, posisi NU justru terjepit. Tahun 1971 pemilu yang pertama masa Soeharto dan NU sangat berat karena dihajar habis oleh Golkar. Dijelaskannya menyelamatkan jamaah NU yang sedemikian banyak memerlukan kepribadian arif dan tangguh. Hasyim Muzadi menilai bahwa orang yang mengerti Pak Idham menyatakan beliau orang yang istikomah dalam berbagai situasi, tetapi orang yang tidak cocok pasti mengatakan oportunistis, karena dari masa ke masa selalu mendapatkan tempat.

Meskipun berbeda pandangan politik, Hasyim mengatakan Kiai Idham tetap menjalin silaturahmi dan ukhuwah dengan Buya Hamka. Perbedaan partai ini tidak mengurangi silaturahmi dengan yang lain sehingga Pak Idham dengan

Buya Hamka. Ketidakharmonisan dalam bidang politik tidak harus membuat pemimpin tidak harmonis dalam ukhuwwah.⁶⁵

⁶⁵ Lihat Anonim, <http://gp-ansor.org/biografi>, diakses tanggal 4 April 2013.